

radar.

MEDIA





FOKUS DIGITALISASI, PEMKAB KUTIM RAIH PERINGKAT TERBAIK KETIGA TP2DD WILAYAH KALIMANTAN

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) meraih penghargaan peringkat terbaik ketiga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan. Penghargaan itu diserahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kegiatan Championship TP2DD 2023 sekaligus Rakornas P2DD 2023, di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (3/10/2023).

Sekadar diketahui, Championship TP2DD 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas evaluasi kinerja serta apresiasi bagi kerja nyata pemerintah daerah dalam implementasi program P2DD pada 2023.

Ditemui usai menerima penghargaan Wabup Kutim Kasmidi Bulang mengucapkan syukur Pemkab Kutim dapat meraih penghargaan tersebut. Selain Kutim di Kaltim, ada Kutai Kartanegara (Kukar) pun yang mendapatkannya. Untuk itu wajib diapresiasi Pemkab Kukar.

"Ke depannya kita harus bisa lebih mening-

kat apalagi terkait digitalisasi ini. Terutama di bidang keuangan daerah," kata orang nomor dua di Pemkab Kutim itu didampingi Kepala Bapenda Kutim Syahfur.

Ditambahkan Kasmidi, ada 11 pajak yang sudah bisa dibayarkan melalui digitalisasi Bapenda Kutim. Ini jadi salah satu program Kutim bisa menyabet tiga besar ini.

"Ini merupakan kerja sama yang sudah kita laksanakan. Tentu kita harus terus berinovasi berkaitan dengan program daerah yang harus selaras dengan program pusat," tegasnya.

Senada, Kepala Bapenda Kutim Syahfur menegaskan berkaitan dengan program digitalisasi ini, pihaknya sudah menyelesaikan SK Bupati terkait program-program apa saja yang bakal segera dikebut.

"Salah satunya pelaksanaan bayar pajak secara online, baik di 11 pajak dan retribusi bisa menggunakan Qris," singkatnya.

Pewarta : Irfan Aditam
Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**BPSDM KALTIM**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIMDra. Nina Dewi
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM

Isran Noor Saat Membuka Kegiatan pengembangan Kompetensi ASN dan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda beberapa waktu lalu.

ISRAN NOOR, SANG PEJUANG TENAGA HONORER KALTIM

SAMARINDA – Pejuang Kesejahteraan Honorer Indonesia mungkin layak disandang oleh Isran Noor mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru saja mengakhiri masa jabatan 1 periodenya ini, betapa tidak perjuangan dan perhatian beliau terhadap tenaga non Aparatur Sipil Negara ini tidak main-main.

Bahkan ketika ada rencana penghapusan tenaga honorer berhembus, Isran adalah salah satu kepala daerah di Indonesia yang bersuara keras menolak wacana itu. Semasa menjabat Gubernur Kaltim, Isran kerap memasang badan untuk memperjuangkan agar tidak ada menghapus tenaga honorer provinsi.

Rencana penghapusan tenaga honorer mulai didengungkan ke publik pada pertengahan tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu yang dijabat oleh Almarhum Tjahjo Kumolo, mengeluarkan surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 dan menyebut bahwa keberadaan tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023.

Tak mengindahkan rencana pemerintah pusat, Isran melawan arus dengan menolak kebijakan tersebut. Alih-alih penghapusan, Isran mengusulkan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tak hanya itu, baru di masa Gubernur Isran, berbagai manfaat diterima para tenaga honorer. Mulai dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan tanggungan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan.

Menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Pada 26 Oktober 2022, dimanfaatkan Isran untuk memperjuangkan penolakan penghapusan

san tenaga honorer ke pemerintah pusat.

Hubungan baiknya dengan Menteri RB saat ini, Abdullah Azwar Anas, memudahkan komunikasi perihal upaya mempertahankan pegawai non ASN. Pemerintah pusat akhirnya membatalkan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 dan menyiapkan formula baru dalam mengakomodasi 2,3 juta pegawai non ASN seluruh Indonesia.

Di masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Kaltim, Isran bahkan masih menjamin keberadaan tenaga honorer tidak akan dihapus.

"Meski nanti saya tidak menjabat, saya masih pantau. Tenang saja, kalian (tenaga honorer) tidak akan dihapus," ujar Isran pada sambutan kegiatan pengembangan Kompetensi ASN dan Orientasi PPPK yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda beberapa waktu lalu.

Di tengah-tengah sambutannya tersebut, Isran sempat berhenti berbicara, sambil membuka-buka catatannya, sekitar beberapa menit Isran kemudian kemudian beralih dari podium menuju meja narasumber mengambil tisu dan kembali lagi ke podium, ternyata beliau ingin menghapus air matanya yang dari tadi menutupi pandangannya.

Dia pun berpesan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Peringkat Daerah (OPD) agar tidak marah-marah kepada bawahannya terutama PPPK, karena menurutnya marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah.

"Buat pimpinan OPD semuanya, saya titip mereka ini. Jangan dimarahi kalau mereka ada berbuat salah, karena tidak akan menyelesaikan masalah, kasih tahu lah dengan baik-baik," katanya dengan

mata yang berkaca-kaca.

Termasuk perilaku dan sikap para pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon dalam berkomunikasi dengan bawahan (staf). "Saya harap pimpinan OPD baik provinsi dan kabupaten/kota, jadilah pemimpin yang mengayomi bawahannya," pintanya.

Pesan juga diharapkan kepada para pejabat jabatan tinggi pratama atau sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagai pimpinan tertinggi di bawah gubernur, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina kepegawaian.

"Anak buah itu bagian daripada diri kita sendiri," lanjutnya.

Sebab bagaimana pun juga, ungkap orang nomor satu Benua Etam itu, bahwa pimpinan sebagai pembina bawahan wajib memiliki tanggungjawab, maka tidak boleh membiarkan bawahannya dalam posisi salah. "Tinggal bagaimana kita berkomunikasi. atau sampaikan informasi secara baik. Pokoknya jangan marah, sebab itu akan menambah gap antara pimpinan dengan bawahan," pungkasnya. Dalam suasana haru, Isran sempat bergu-ran dengan lawakan yang memang menjadi ciri beliau yang suka bercanda saat memberikan sambutan.

"Pak m, kita harus kasihan sama mereka (PPPK), pendapatan masih kecil, banyak tanggungan mereka, punya anak satu dan istri 3," candanya.

Tapi Isran juga memuji seluruh Pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, adalah pemimpin yang baik. "Tapi kebetulan para pimpinannya bagus-bagus semua, OPD-OPD itu. Mereka sayang semua sama anak-anak buahnya," pujiannya. (ADV)

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



BPKAD DAN DPKD KALTIM MUSNAHKAN ARSIP BERUSIA LEBIH DARI 10 TAHUN



Pemusnahan arsip menggunakan mesin pencacah arsip

SAMARINDA - Arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. Hal ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Atas dasar tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim melakukan pemusnahan Arsip Ex Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kurun waktu Tahun 2007 sekaligus penyerahan arsip statis kepada DPKD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa (3/10/2023) bertempat di Aula Kantor BPKAD Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota.

Pemusnahan arsip tersebut, dihadiri langsung oleh Arsiparis Alih Media Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara, Drs. Tato Purjianto, Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ir. Riza Indra Riadi, M.Si., Plh DPKD Kaltim Taufick S.Sos,M.Si Dan Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E,MM.

Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E,MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyebutkan bahwa di

lembaganya terdapat 9.425 berkas arsip statis, 85 berkas arsip akan diserahkan dan disimpan DPKD Kaltim, dan data lainnya 2.236 arsip disimpan BPKAD berstatus inaktif dan 6.707 arsip disetujui untuk dimusnahkan.

"6.707 arsip telah disetujui dimusnahkan, saya sangat apresiasi pejuang arsip BPKAD. Sejak 2015, BPKAD sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 kali. Semoga semangat menjaga dan merawat arsip ini dapat menjadi inspirasi bagi SKPD lainnya dalam upaya tertib pengelolaan arsip," papar Fahmi.

Fahmi melanjutkan, BPKAD menjadi SKPD yang dinilai baik dalam pengelolaan arsip setelah Universitas Indonesia. Namun, bukan hanya dari segi prestasi yang harus ditiru akan tetapi komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan yang menjadi harapan Fahmi kepada seluruh OPD di Kaltim.

"Bukan hanya prestasi, Yang paling penting adalah komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, S.Sos,M.Si, memberikan apresiasi kepada DPKAD atas dedikasinya dalam menjaga pengelolaan arsip dengan tertib.

Taupik menyebutkan saat ini

baru terisi 25 persen penyimpanan arsip OPD di Depo Arsip DPK Kaltim. Ia berharap 75 persen dari ruang penyimpanan Depo Arsip turut dapat diisi oleh berkas OPD lainnya.

"DPKD Kaltim menjadi pilot project untuk OPD lain dalam menerapkan sistem penataan arsip. Mohon partisipasinya secara profesional kepada masing-masing OPD. Arsip yang dikelola dengan baik akan mempunyai nilai yang sangat vital dan penting," jelas Taufik kepada para audiens yang hadir.

Usai sambutan agenda kemudian dilanjutkan dengan proses pemusnahan arsip melalui mesin pencacah arsip oleh Plh Kepala DPK Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim, dan perwakilan ANRI. Ditutup dengan penyerahan arsip statis secara simbolis oleh BPKAD kepada DPK Kaltim.

Diketahui, Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA. PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
GO GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Kepala Dinkes Kaltim memaparkan evaluasi APBD. (Istimewa)

DINKES KALTIM GELAR EVALUASI APBD TAHUN 2023

BALIKPAPAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kaltim, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian indikator kinerja," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Dinkes Kaltim melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan dan memasukkan hasil pantauan dan evaluasi itu ke aplikasi Evapor Bappeda.

Dalam kegiatan pemantauan-evaluasi itu juga membahas

rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia layanan.

"Kami harus menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018," ungkapnya.

Menurutnya, RUP harus dimuat dalam aplikasi SIRUP dan dapat ditambahkan dalam situs web, papan pengumuman, surat kabar, atau media lain. RUP juga harus diperbarui jika ada perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa itu juga wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Perpres No. 12/2021.

Produk dalam negeri yang digunakan harus memiliki nilai TKDN ditambah BMP minimal 40 persen. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh ke-

menterian perindustrian.

"Pengadaan barang impor hanya dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik," imbuhnya.

Menurut informasi, Dinkes Kaltim juga mendapatkan paparan dari narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi Dinkes Kaltim dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengadaan barang/jasa.

Pewarta : Nit
Editor : Nicha Ratnasari



PERBUP KETENAGAKERJAAN KUTIM DITARGET RAMPUNG AKHIR TAHUN 2023

SANGATTA - Peraturan Daerah (Perda) Kutai Timur (Kutim) tentang Ketenagakerjaan telah disahkan dan disosialisasikan sejak bulan Mei 2023 lalu. Perda yang mengatur tentang regulasi dalam merekrut hingga memperkerjakan karyawan itu akan diperkuat oleh Peraturan Bupati (Perbup).

Saat ini, Perbup penguat Perda Ketenagakerjaan Kutim tengah dibahas oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim.

"Sementara berjalan (pembahasan Perbup Ketenagakerjaan) kan konsepnya Perbup ini tidak boleh bertentangan peraturan daerah (Perda Ketenagakerjaan) yang ada maupun peraturan di atasnya," ungkap Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latif,

belum lama ini, Selasa (3/10/2023).

Lanjutnya, ia menargetkan akhir tahun 2023 ini dapat menyelesaikan Perbup yang menguatkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, Sudirman juga menjelaskan ada 3 poin penting yang menjadi fokus pembahasan Perbup Ketenagakerjaan dalam memperkuat Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pertama, soal pendidikan dan penyiapannya untuk sumber daya manusia (SDM). Lalu yang kedua, ada pola rekrutmen karyawan oleh perusahaan di Kutim.

"Karena pada pola rekrutmen itu ada aturan 80 persen (tenaga kerja lokal) dan 20 persen (luar daerah)," ucapnya.

Artinya, ditargetkan 80 persen pihak perusahaan dalam merekrut tenaga kerja dalam daerah Kutim berdasarkan atas kemampuan SDM lokal.

Namun, itu bisa berubah saat SDM tidak tersiapkan atau tidak memenuhi persyaratan sebuah perusahaan.

Oleh sebab itu, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri milik Disnakertrans Kutim, lembaga pelatihan swasta sebagai mitra Pemkab Kutim termasuk balai latihan milik perusahaan perannya sangat dibutuhkan.

"Yang ketiga, adalah hubungan industrial jadi dengan pola pembinaan akan mencerminkan bagaimana membangun pola hubungan industrial," pungkasnya.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



TEKAN INFLASI, PEMKAB PPU GELAR OPERASI PASAR SEMBAKO TIAP KECAMATAN



**BUNGA TABEBUYA, "WARISAN" AGM
YANG DINILAI LAYAK JADI IKON PPU**



Warga saat berbelanja di pasar murah Pemkab PPU, Rabu (4/10/2023).

Robbi/MediaKaltimGroup

TEKAN INFLASI, PEMKAB PPU GELAR OPERASI PASAR SEMBAKO TIAP KECAMATAN

PPU - Menekan tingginya angka inflasi, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) gelar operasi pasar sembako di Pasar Nipah-Nipah mulai Rabu, (4/10/2023). Bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan sembako dengan harga yang relatif murah.

Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Saidin menyebut terdapat tiga jenis bahan pokok yang dipasarkan, beras, gula, dan minyak. Ketiga komoditas tersebut merupakan bahan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.

"Sasaran kegiatan ini diperuntukkan kepada masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhannya," ucapnya.

Dalam gelaran ini, disediakan sebanyak 1,5 ton beras, dengan harga Rp 50.000 per 5 kilogram (kg). Untuk gula disediakan 200 kg dijual 14.000 per kg dan 120 liter untuk minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter.

Saidin mengatakan pengadaan operasi pasar sembako telah melibatkan distributor seperti Badan Usaha Logistik (BULOG) PPU dan pasokan tambahan dari Alfamidi.

Tentunya operasi pasar sembako atau pasar murah tidak dilaksanakan di satu titik. Setiap kecamatan dipastikan bakal mengadakan pasar sembako.

"Masih ditentukan titiknya, tetapi setiap kecamatan pasti ada," ungkapnya. **(SBK)**



MediaKaltimGroup

Bunga tabebuaya yang mekar di sekitar depan Kantor Bupati PPU.

BUNGA TABEBUYA, "WARISAN" AGM YANG DINILAI LAYAK JADI IKON PPU

PPU - Semarak bermekaran-nya bunga tabebuaya beberapa hari terakhir menjadi fenomena tersendiri di Penajam Paser Utara (PPU). Atmosfer (vibes) di sekitar Kilometer 9 Nipah-Nipah jadi sesaat berbeda dari biasanya.

Selain bunga tabebuaya, mekar juga bunga bungur dan bunga kertas (bugenvil). Ketiganya memiliki mekar dengan beragam warna, mulai kuning, pink, putih dan ungu serta orange.

Pohon-pohon ini ditanam ketika Abdul Gafur Mas'ud (AGM) masih menjabat sebagai Bupati PPU. Di awal tahun memipin, ia menggagas adanya penanaman pohon hias untuk meningkatkan estetika ruang terbuka hijau (RTH).

"Itu era AGM. Berkeinginan PPU ini seperti negara sakura. dan ditanamlah pohon-pohon itu," kata Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron, Selasa (3/10/2023).

Dari penelusuran laman Ipse. penajamkab.go.id, program

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Pengadaan ratusan pohon hias dengan pagu anggaran sekira Rp 1,1 miliar.

Sebagai komisi yang membidangi soal pertamanan, Thohiron termasuk legislatif yang mendukung program tersebut. Sepakat dengan perlu adanya lingkungan yang estetik.

"Kalau Saya, terinspirasi juga dengan yang ada di Malang," sebutnya.

Pun dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai aset yang ada ini terpelihara dan menjadi ikon khusus.

"Tinggal dirawat dengan baik. Sehingga itu menjadi pemandangan yang indah, menjadi ikon daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan perlu adanya sinergitas dalam menyikapi fenomena kali ini. Selain Disperkimtan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dianggap memiliki andil dalam menjaga kebersihannya.

"Yang tahun ini memang lebih banyak yang mekar. Kemudian bunga itu gugur, tinggal dinas kebersihan. Jangan juga sampai sehari-hari yang gugur dibiarkan, harus dibersihkan, supaya lingkungan menjadi tetap nyaman dilihat," pungkas Thohiron. (SBK)



Robbi/MediaKaltimGroup

Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron.



DILIRIK PESUT ETAM, KADISPORA KUKAR: FASILITAS STADION AJI IMBUT SEGERA DIPERBAIKI



**PERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD,
PEMKAB KUKAR GELAR KUKAR
BERSHOLAWAT JILID 2**



Istimewa

Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang yang dilirik Borneo FC sebagai home base Liga 1 Indonesia.

DILIRIK PESUT ETAM, KADISPORA KUKAR : FASILITAS STADION AJI IMBUT SEGERA DIPERBAIKI

TENGGARONG - Setelah dilirik oleh tim Liga 1 Indonesia Borneo FC, kini Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) siap berbenah. Melakukan sejumlah perbaikan fasilitas yang diketahui sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Termasuk kondisi rumput lapangan yang menguning, pasca digunakan untuk KukarLand Festival 2023 lalu.

Langkah awalnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, pun memulai melakukan penilaian. Mengecek fasilitas apa saja yang harus diperbaiki, dan sesuai standar home base untuk klub peserta Liga 1 Indonesia.

"Termasuk rumput ini kami menunggu dari manajemen Borneo FC untuk memastikan hasil penilaian mereka," ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni.

Namun, pihaknya pun akan kembali memastikan langkah dari tim Pesut Etam, pasca sidak Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, beberapa waktu lalu. Jika memang ada kata sepakat untuk menggunakan stadion termegah di Kukar tersebut, maka fasilitas yang dianggap penting dan menurut mereka kurang akan segera diperbaiki.

"Yang pasti PR terbesar adalah rumput dan lampu. Rumput Insya Allah ada perawatan tahun ini, setelah itu langsung off kan (ditutup) lapangan, langsung kita lakukan perawatan dengan baik," lanjut Ali.

"Kalau lampu masih dalam tahap perencanaan perhitungan berapa pembiayaan yang dimunculkan dari perbaikan lampu yang ada," tutup Ali. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin. (Rafi'i/Media Kaltim)

Komisi IV DPRD Kukar Dorong Pengadaan Kendaraan Damkar

TENGGARONG - Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), mendorong pemenuhan alat penanganan kebakaran ditingkatkan. Terutama di kecamatan-kecamatan yang belum dipenuhi sarana mobil pemadam kebakaran (damkar).

Ketersediaan mobil damkar yang ada saat ini, pun jauh dari kata ideal. Melihat bentuk geografis wilayah Kukar yang begitu luas, maka masalah musibah kebakaran di kecamatan-kecamatan yang jaraknya jauh dari Tenggarong harus ditangani dengan baik.

"DPRD Kukar dalam hal ini mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk pengadaan unit mobil damkar di setiap kecamatan," jelas Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin.

Selain mobil damkar di Kecamatan, perlu juga pengadaan kendaraan viar dan mesin pompa air portabel untuk menangani kebakaran di daerah padat penduduk yang memiliki jalan berukuran kecil seperti gang, sehingga sulit dimasuki mobil damkar yang berukuran

besar.

Jika diperlukan, setiap dusun di wilayah desa memiliki kendaraan viar beserta peralatan pemadam kebakaran. Dengan perlengkapan yang memadai mereka bisa menjadi antisipasi awal terjadinya musibah kebakaran.

"Kita menekankan agar peralatan itu bisa disediakan minimal di masing-masing desa," ujarnya.

Baharuddin menambahkan, pengadaan tersebut juga telah dibahas pada penganggaran APBD perubahan 2023. Ia memastikan ada sebagian unit damkar dan perataan damkar yang telah dianggarkan.

Komisi IV DPRD Kukar pun komitmen bakal terus mendorong agar pengadaan unit mobil damkar dan peralatan dapat tercover kembali di tahun 2024 mendatang.

"Kita pastikan alokasi anggarannya di perubahan ini terealisasi, dan sisanya kita anggarkan di murini 2024," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Gelaran Kukar Bersholawat Jilid 1 yang dilaksanakan pada Road To Erau 2023. (Istimewa)

Peringati Maulid Nabi Muhammad, Pemkab Kukar Gelar Kukar Bersholawat Jilid 2

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kini tengah menyiapkan agenda Kukar Bersholawat Jilid 2. Setelah disambut antusias oleh kaum muslimin pada gelaran Kukar Bersholawat Jilid 1 yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf.

Kukar Bersholawat Jilid 2 yang mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf ini, akan digelar saat bertepatan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Direncanakan akan digelar di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Dengan target mencapai 6 ribu jemaah.

"Kalau yang lalu kan targetnya 3-4 ribu, karena ini cakupannya stadion, maka target jemaah kita naikan," ucap Kabag Kesra Pemkab Kukar, Dendy Irawan Fahriza.

Nantinya, Pemkab Kukar akan menggandeng Yayasan Majelis Al Kheir Wal Barokah Tenggarong. Yayasan inilah yang akan menyiapkan segala keperluan. Mulai dari berkoordinasi untuk mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

"Insya Allah mereka yang akan memfasilitasi, termasuk mereka juga yang berkoordinasi dan menjembatani komunikasi dengan Habib Syech," lanjut Dendy.

"Tapi kurang lebih pelaksanaannya sama dengan jilid pertama, dan ini mungkin jauh lebih tertib lagi, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang pertama," sambungnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga melibatkan banyak organisasi Islam untuk turut serta, dan mensukseskan gelaran Kukar Bersholawat jilid 2.

"Organisasi Islam tentu kita libatkan juga. Jadi, kami harap masyarakat Kukar dan sekitarnya dapat ikut datang bersholawat bersama," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berharap Kukar Bersholawat jilid 2 dapat berjalan lancar seperti pelaksanaan yang pertama.

Ia berharap dukungan masyarakat untuk kelancaran dan ketertiban jalannya acara, termasuk untuk ikut serta menjaga kebersihan.

"Insya Allah ini akan berjalan lancar juga. Karena dilihat dari Kukar Bersholawat pertama, semua berjalan aman dan lancar, dan semoga yang kedua juga sama, dengan antusiasme masyarakat yang lebih besar lagi," tutup Rendi singkat. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Suasana pertemuan Bupati Kukar, Edi Damansyah dengan beberapa perusahaan untuk membahas kerjasama dalam hal memfasilitasi pelatihan kompetensi. (Istimewa)

Jalin Kerjasama, Distransnaker Kukar Kirim 30 Pemuda Ikuti Pelatihan Basic Operator

TENGGARONG - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar), lakukan pelatihan basic operator. Pelatihan yang masuk dalam Program Kukar Siap Kerja ini, dilakukan dengan bekerjasama dengan PT Buma dan PT Biru.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Distransnaker Kukar, Syarifah Rositah, menjelaskan peserta pelatihan ini akan dilatih dengan mekanisme magang di PT Biru selama satu tahun. Setelah itu para peserta akan langsung diterima sebagai karyawan tetap di PT Buma.

"Ini pesertanya 30 anak se-Kukar, 20 orang akan diseleksi oleh PT Buma dari 3 kecamatan lingkaran tambang, yaitu Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Sedangkan 10 sisanya Distransnaker yang merekrut," terangnya.

Syarifah mengatakan, rekrutmen yang

dilakukan oleh Distransnaker Kukar memprioritaskan masyarakat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses seleksi sendiri masih terus berjalan, dan pada hari ini para peserta akan mengikuti tahap seleksi wawancara yang dilakukan secara daring.

Nantinya jika dinyatakan lulus, para peserta akan menerima uang saku dari PT Buma selama pelatihan berlangsung. Selain itu, mereka juga akan menerima berbagai fasilitas seperti tempat tinggal dan makan.

"Syaratnya khusus yang diberikan dalam pelatihan ini adalah peserta belum menikah dan berusia 21 sampai 26 tahun. Selama pelatihan juga mereka tidak diperkenankan menikah, karena kan pelatihannya selama setahun," pungkasnya. (Adv)

Pemulis :Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan.

Tangani Masalah Sampah, Kelurahan Loa Ipuh Siapkan Bank Sampah Tiap RT

TENGGARONG - Masalah sampah menjadi salah satu isu yang sedang dikerjakan Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara-rong. Memastikan pengelolaan sampah di kelurahan terbesar di Tenggara-rong itu, bisa tertangani dengan baik dengan melakukan beberapa inovasi.

Salah satunya dengan membentuk Bank Sampah yang melibatkan masing-masing Rukun Tetangga (RT). Sehingga sampah rumah tangga warga bisa langsung tertangani, dan terpilah sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Erri melanjutkan, pengelolaan sampah berbasis RT ini akan terealisasi pada Oktober 2023. "Targetnya adalah 30 persen pengurangan tumpukan sampah rumah tangga di

TPA," jelas Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan.

Untuk saat ini, di Kelurahan Loa Ipuh baru ada dua Bank Sampah yang terbilang aktif. Masing-masing dikelola oleh warga dan pihak swasta. Tentu jika masing-masing RT di Kelurahan Loa Ipuh yang berjumlah 77 RT memiliki Bank Sampah masing-masing, maka ia menyakini permasalahan sampah di wilayahnya akan tertangani dengan baik.

"Agar sampah rumah tangga ini bisa dikelola optimal, jadi kita akan bentuk lagi Bank Sampah di tiap-tiap RT. Insya Allah kita akan mulai dari awal minggu Oktober ini," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Rafi'i/Media Kaltim

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin.

Bersama Dinsos, DPRD Kukar Studi Banding Penanganan Kemiskinan Ekstrem

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), terus mencari cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara (Kukar). Memastikan penanganan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah yang dianggap berhasil penanganannya. Yakni dengan melakukan lawatan ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum lama ini, bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, menjelaskan penanganannya pun harus berbasis data. Dari hasil kunjungan mereka ke Kutim, agar penerima manfaat tepat sasaran, maka Pemkab Kutim pun memasang papan pemberitahuan "warga miskin" di rumah-rumah yang benar-benar berhak

menerima.

"Setiap penerima dibuatkan semacam papan dari kaleng di depan rumah dengan bahasa kurang lebih "saya orang miskin" atau "saya penerima bantuan". Nah ini salah satunya," ujar Baharuddin.

Hal ini pun dianggap suatu inovasi yang bisa saja diterapkan di Kukar. Sehingga bantuan yang disalurkan melalui APBD ataupun APBN bisa menasar kepada yang berhak menerima. Memastikan penerima bantuan dan data yang dimiliki oleh Pemkab Kukar tersinkronisasi.

"Ini salah satu program yang kita coba canangkan supaya pendataan itu betul-betul sesuai. Nanti kita buktikan dengan pemasangan papan nama di depan rumah," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Keinginan Kesultanan, Bupati Kukar Terima Usulan Museum Dijadikan Kawasan Budaya

TENGGARONG - Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mengusulkan wilayah Museum Negeri Mulawarman Tenggarong dan sekitar menjadi kawasan budaya. Saat para wisatawan yang masuk di area tersebut, wajib mengenakan pakaian budaya, salah satunya menggunakan pesapu.

Hal ini disampaikan langsung oleh kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Muhammad Heriansyah, gelar Pangeran Noto Negoro saat menyampaikan sambutan usai ritual merebahkan tiang Ayu di Keraton, Museum Negeri Mulawarman Tenggarong, Senin(2/10/2023) kemarin.

"Agar Tenggarong yang sudah berusia 241 tahun, jauh lebih lama daripada berdirinya NKRI benar-benar dimaknai menjadi kota budaya. Wilayah keraton dan kedaton bisa ditetapkan wilayah budaya, jadi yang masuk kawasan wajib memakai pakaian budaya, seperti pesapu dan lain-lain," ucap Heriansyah.

Selain itu bisa mengadakan pagelaran, sehingga para pelaku

dan komunitas seni bisa memiliki wadah menyalurkan bakatnya. Dirinya juga berharap agar Car Free Day juga bisa diselenggarakan di sekitar kedaton. "Sehingga mendorong ekonomi UMKM bisa tumbuh di sekitar sini," sebutnya.

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membangun sejumlah area publik yang diberi nama yang berhubungan dengan kesultanan, seperti Menara Mahkota Tuah Himba dan Taman Keraton Titik Nol Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Di sisi lain pihaknya juga mengusulkan kapal Kartanegara yang berada di Waduk Panji Sukrame, kendaraan dari Sultan AM Parikesit dalam menjalankan roda pemerintah, hadiah dari pemerintah Belanda bisa dipindahkan ke kawasan Tanjung di tepi Mahakam.

"Ada nilai-nilai sejarah yang bisa diwariskan kepada generasi muda. Bisa menjadi icon objek wisata daripada kondisi memprihatinkan," harapnya.

"Kami berharap niat baik dan

kesultanan bisa diterima dan ditindaklanjuti," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerima baik dan siap mengkaji sejumlah usulan yang disampaikan, terkait ingin ditetapkannya kawasan Museum menjadi kawasan budaya.

"Saya kira kami menyambut hal baik itu, mungkin nanti akan dilakukan kajian-kajian sehingga ini bisa ditetapkan dalam kebijakan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara," ucap Edi Damansyah.

Termasuk permintaan pemindahan unit kapal bersejarah yang ada di Waduk Panji Sukrame. Nanti juga akan dikaji dan dimusyawarahkan kembali. Edi menambahkan bahwa pemerintah kabupaten mendukung sepanjang itu bagian sarana dan prasarana. Sejarah yang diketahui oleh generasi dan mempunyai daya tarik untuk Kota Tenggarong.

"Pengembangan pariwisata, saya kira kami support semua dalam persoalan itu," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Seminar pendahuluan terkait penelitian pengelolaan sampah di 6 kecamatan di Kukar. (Istimewa)

BRIDA Kukar Tetapkan 6 Kecamatan Jadi Lokus Penelitian Pengelolaan Sampah

TENGGARONG - Sejumlah penelitian dan kajian dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara (BRIDA Kukar), salah satunya terkait pengelolaan sampah di Kukar. Total ada 6 kecamatan yang masuk dalam radar penelitian, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Brida Kukar, Karno.

"Sebelumnya melakukan penelitian, kami sudah melakukan seminar pendahuluan. Sekarang masuk dalam proses penelitian lapangan," jelas Karno belum lama ini.

Sejumlah pihak dilibatkan oleh BRIDA Kukar untuk melaksanakan seminar pendahuluan. Diantaranya membahas pendahuluan penelitian, metodologi penelitian, hingga rumusan masalah. Dalam seminar pendahuluan yang digelar pada pertengahan bulan lalu, BRIDA Kukar sudah meminta tanggapan sejumlah ahli.

Sebut saja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar, dan akademisi Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

"Kami ingin masukkan dari sejumlah pihak sebelum melakukan penelitian di lapangan," jelasnya.

Tujuan penelitian ini, Karno mengatakan pihaknya tengah mencari informasi tentang pengelolaan sampah di enam kecamatan di Kukar. Masing-masing di Kecamatan Sangasanga, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, dan Muara Badak.

Sementara sebagai penanggungjawab survei, Brida Kukar memberi kepercayaan kepada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. "Kami memilih universitas itu karena mereka sudah memiliki pengalaman penelitian pengelolaan sampah di Yogyakarta," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Pemkab Kukar Terima 2 Penghargaan Sekaligus di Rakornas P2DD 2023

TENGGARONG - Kabar gem-bira datang dari Jakarta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), sukses meraih dua penghargaan sekaligus. Saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas),

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang dilaksanakan di Grand Sahid Hotel Sudirman, Jakarta, Selasa (3/10/2023) kemarin.

Diketahui, rakornas ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah. Sekaligus mengumumkan hasil evaluasi kinerja P2DD Tahun 2022 (Award 2023).

Mengangkat tema "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju", Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan kementerian, lembaga anggota satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD.

Rakornas yang dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto ini, juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri PAN Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, yang mewakili Pemkab Kukar dalam Rakornas ini adalah Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin bersama dengan Sekretaris Bapenda, Muhamad Japar.

Pelaksanaan Rakornas kali ini terasa begitu istimewa. Karena selain mengikuti kegiatan ini, Pemkab Kukar juga berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus. Pertama penghargaan P2DD dari Kategori Kabupaten Terbaik wilayah Kalimantan dan Kategori Program Unggulan P2DD Terbaik melalui



Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat memegang dua penghargaan yang diraih Pemkab Kukar. Istimewa

"Program Si Pajol Betijak".

Rendi yang berkesempatan langsung menerima penghargaan ini mengatakan, penghargaan yang sukses dibawa ke Kukar olehnya ini merupakan hasil dari kerja keras semu elemen di Kukar. Tidak lupa juga ini bisa didapat berkat doa dan dukungan dari masyarakat.

"Alhamdulillah, 2023 ini cukup menggembirakan bagi kami, karena beragam penghargaan dari berbagai sektor bisa sampai ke Tenggarong," ucap Rendi Solihin.

Ia mengatakan, penghargaan yang diraih ini juga merupakan bukti nyata, bahwa Kukar tidak hanya kaya sumber daya alamnya

ya saja, melainkan kaya akan kinerja, inovasi, serta terobosan di berbagai bidang.

"Ini membuktikan bahwa Kukar memiliki daya saing, dan juga menjadi bukti bahwa Kukar mampu menjadi daerah penopang IKN," jelasnya.

Rendi juga menegaskan penghargaan tersebut bakal menjadi motivasi tersendiri bagi Pemkab Kukar untuk terus mengembangkan wilayah dan masyarakatnya. "Kita tidak akan berhenti di sini saja, karena masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kemajuan Kukar dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (adv)

Pemulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Sekretaris Dispora Kukar, Syafliansah.

Ady/Radar Kukar

Jabat Sekretaris Dispora Kukar, Syafliansah Optimis Cepat Beradaptasi

TENGGARONG - Baru dilantik dan melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), Syafliansah, optimis bisa cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Dispora Kukar.

Saat dijumpai pasca pelaksanaan sertijab, Syafliansah mengaku berterimakasih pada Bupati Kukar, Edi Damansyah, atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya.

Ia juga berharap bisa segera beradaptasi dan bekerjasama dengan rekan kerja barunya di Dispora Kukar. Baginya perpindahan jabatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, yang harus dihadapi sebagai seorang Apratur Sipil Negara (ASN).

"Mudah-mudahan bisa cepat lah dalam proses pelaksanaan kegiatan di Dispora Ku-

kar," katanya, Rabu (4/10/2023).

Untuk diketahui, sebelumnya Syafliansah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Ia dipindahtugaskan bersama 16 Pejabat Administrator dan Pengawas oleh Bupati Kukar pada Selasa (3/10/2023) kemarin.

Untuk bisa cepat beradaptasi, ia mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh bidang di Dispora Kukar. Guna memahami rangkaian kegiatan apa saja yang harus diselesaikannya selama sisa tahun 2023.

"Sisa waktu kita di tahun 2023 ini kan cukup singkat, hanya tiga bulan. Tapi kami yakin kawan-kawan di Dispora bisa cepat dalam penyerapan anggaran," tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana penandatanganan berkas Sertijab Sekretaris Dispora Kukar. (Ady/Radar Kukar)

Hadiri Sertijab Sekretaris Dispora Kukar yang Baru, Sekkab Sunggono : Segera Adaptasi

TENGGARONG - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menghadiri langsung Serah Terima Jabatan (Sertijab) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar. Yang digelar di Gedung Sekretariat Dispora Kukar, pada Rabu (4/10/2023) pagi.

Dalam kesempatan ini, Sunggono mengucapkan terimakasih atas dedikasi Ramadhan, yang merupakan Sekretaris Dispora Kukar terdahulu. Dimatanya, selama ini Ramadhan telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Dispora Kukar. Meski selama ia menjabat, sudah beberapa kali pimpinan OPD tersebut berganti.

"Mudah-mudahan apa yang sudah beli-

au lakukan selama ini, itu bisa ditingkatkan baik itu kualitas maupun mutunya dari pejabat yang baru yaitu pak Syafliansyah," kata Sunggono.

Ia juga berharap agar Sekretaris Dispora Kukar yang baru, dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Serta dengan kehadirannya diharapkan dapat menjadi energi positif yang bisa mendorong kemajuan Dispora Kukar.

"Pesan kami untuk Sekretaris Dispora yang baru menjabat agar tetap semangat, jaga kesehatan, kita harus kejar target. Karena waktu kita akhir tahun sudah semakin dekat," tutup Sunggono. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



AMBO HANYA BISA PASRAH, RUMAHNYA DIJAGA APARAT SAAT EVAKUASI

BACA HALAMAN A2



**Ragam Reaksi Netizen Tanggapi
Bioskop XXI Tayang di Citimall
Bontang 11 Oktober**



Sosialisasi rawan buaya di sekitar rumah Ambo.

Ambo Hanya Bisa Pasrah, Rumahnya Dijaga Aparat saat Evakuasi

BONTANG – Dengan dievakuasinya buaya diduga Riska, Ambo mengaku hanya bisa pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Apabila memang benar buaya tersebut adalah Riska, buaya yang selama ini dipe-liharanya.

Hal itu diungkapkan Ambo saat Redaksi Radarbontang.com menyambangi ke rumahnya.

Diceritakan warga yang tinggal di bantaran Sungai Guntung itu, buaya diduga Riska itu dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Senin (3/9/2023) malam kemarin. Saat malam penangkapan, dirinya tidak bisa kemana-mana, lantaran rumahnya dijaga oleh pihak

keamanan seperti polisi dan petugas BKSDA.

“Saya dilarang datang ke tempat evakuasi, karena ditakutkan akan bentrok dengan warga,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan kalau sampai saat ini dirinya belum melihat sedikitpun wujud buaya yang ditangkap itu. Dirinya tidak diberitahu sedikit pun keberadaan buaya itu oleh pihak BKSDA ataupun kelurahan.

“Saya gak tau ditaruh dimana buaya itu sekarang,” imbuah Ambo.

Menurut keterangan dari pihak Kelurahan Guntung yang diterimanya saat pembahasan rencana relokasi buaya, buaya-buaya yang berhasil dievakuasi

tersebut akan ditaruh di penangkaran di Samarinda.

Karenanya saat ini dirinya mengaku hanya bisa pasrah tak bisa berbuat apa-apa, kalau memang benar buaya tersebut adalah Riska.

Ke depannya, ia bakal mencari Riska dan berupaya untuk bisa membawanya kembali. Karena menurutnya, Riska bukanlah buaya umumnya. Karena Buaya Riska memiliki hubungan batin dan hubungan darah dengannya.

“Riska bukan buaya biasa. Dia ada hubungan darah dengan kami. Kalau tanya orang-orang Bugis pasti tau itu,” pungkasnya.

Penulis: Yusva Alam



YUSVA ALAM

Ambo saat diwawancara Redaksi Radarbontang.com.

Buaya Hasil Evakuasi BKSDA Diduga Riska, Ini Ciri-Cirinya Menurut Ambo

BONTANG - Informasi penangkapan Buaya diduga Riska dibenarkan Ambo selaku pemelihara buaya muara tersebut. Namun dirinya belum bisa memastikan bahwa buaya itu adalah Riska, buaya yang dipeliharanya selama ini.

Hal itu diungkapkan Ambo saat diwawancara Redaksi Radarbontang.com di rumahnya, Rabu (4/9/2023).

Walaupun belum bisa memastikan bahwa itu Buaya Riska, namun dugaan besar Ambo itu Buaya Riska. Dugaannya berdasarkan pada informasi ciri-ciri yang diterimanya dari warga sekitar.

"Saya dikabari warga yang melihat langsung. Buaya itu panjangnya sekitar 4 meter dan lebarnya sebadan perahu. Nah benar sudah itu Riska," ujarnya.

Ditambah lagi, Selasa paginya setelah Riska ditangkap Senin malam harinya, Ambo datang ke sarang Riska yang berlokasi di

muara Sungai Guntung.

Di sarang Riska terdapat jejak buaya dan jejak kaki orang-orang.

"Terlihat kalau Riska melawan saat ditangkap. Jejaknya kelihatan jelas," imbuhnya.

Ia menceritakan, buaya diduga Riska itu ditangkap Senin malam kemarin. Sebelum penangkapan memang dirinya mendapat informasi dari anak-anaknya, kalau Riska terlihat berjemur di sarangnya di Muara Sungai Guntung.

Karenanya dugaan besarnya bahwa buaya yang dievakuasi oleh Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim adalah Riska.

Pasca dugaan Buaya Riska ditangkap hingga berita ini dinaikkan, dirinya mengaku belum melihat sedikit pun wujud buaya yang ditangkap BKSDA tersebut.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Buaya 4 Meter Diduga Riska Dievakuasi di Sungai Guntung

BONTANG - Seekor buaya berhasil dievakuasi di Sungai Guntung pada Senin (2/10/23) malam. Saat didapati, buaya tersebut sedang berjemur di daratan.

Lurah Guntung, Denny Febrian menjelaskan, buaya tersebut berjenis kelamin jantan dengan panjang 4,42 meter dan lebar perut 70 sentimeter.

Evakuasi tersebut dilakukan oleh tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan juga gabungan dari babindan bhabinkamtibmas Kelurahan Guntung.

"Mereka memang sudah melakukan patroli dan penjagaan dari awal, pasca kejadian penerkaman beberapa waktu lalu. Di dapati Senin malam kemarin," jelasnya saat dihubungi redaksi.

Denny tidak bisa memastikan apakah buaya tersebut Buaya Riska atau bukan, hanya saja evakuasi ini bertujuan untuk membawa buaya-buaya tersebut diamankan kembali ke habitatnya.

Penulis: Syakura

Editor: Yusva Alam



Buaya yang berhasil dievakuasi oleh BKSDA Kaltim.



YAHYA YABO

Ruang VIP Flamboyon di RSUD Taman Husada Bontang.

Ruang Flamboyon, Area Khusus Perawatan Kehamilan dan Kebidanan di RSUD

BONTANG – Ruang Flamboyon adalah salah satu ruangan perawatan di RSUD Taman Husada. Ruangan ini mengakomodir kelompok jenis pelayanan kesehatan terkait pasien khusus kandungan dan kebidanan (persalinan).

Humas RSUD Taman Husada Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha mengatakan ruangan Flamboyon sendiri terdiri dari kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Ia menambahkan ruang flamboyon memiliki SDM sebanyak 28 bidan dan 3 dokter spesialis kandungan.

"Kalau ruang mawar untuk pelayanan persalinan ada 6 bed. Ruang flamboyon terdiri dari kelas 3 ada 12 tempat tidur, kelas 2 ada

4 tempat tidur, kelas 1 ada 2 tempat tidur dan ruang VIP ada 1 tempat tidur. Tentunya kita memfasilitasi kelompok masyarakat yang menggunakan berbagai macam jenis jaminan kesehatan," kata dr Ridha.

Selanjutnya, dr Ridha mengatakan untuk ruangan VIP flamboyon 4 sendiri bagi perawatan pasca melahirkan atau bagi yang memiliki masalah kehamilan.

"Ada permasalahan pada kehamilan yang perlu dirawat inap akan dilayani di sini. Spesifiknya untuk kandungan dan kebidanan. Adanya ruangan ini sebagai wujud realisasi salah satu misi RSUD yaitu menjadi rumah sakit sayang ibu dan bayi terbaik," tandasnya. (adv/yah)



IST

Aktivitas Aipda Bajuri saat masih aktif menjadi Bhabinkamtibmas Loktuan. Kerap beraktivitas bersama warga.

Bhabinkamtibmas Loktuan Aipda Bajuri Pensiun Dini, Disinyalir Terjun ke Politik, Ini Jawabannya?

BONTANG - Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan, Aipda Ahmad Bajuri memutuskan pensiun dini dari kepolisian, per tanggal 1 Oktober 2023. Anggota Polres Bontang yang cukup dikenal oleh warga Loktuan tersebut, secara resmi melepas atribut polisinya.

"Sudah resmi tanggal 1 Oktober kemarin. Bapak Kapolda Kaltim Irjen Pol Sugianto yang langsung menandatangani," ungkapnya.

Keputusannya pensiun inipun mendapat ijin dari atasannya Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya.

"Gak cuma Pak Kapolda, tapi juga Pak Kapolres. Tahapannya cukup panjang sebelum saya dapat surat resmi pengunduran diri," katanya.

Cukup mengejutkan, keputusan pria kelahiran Nganjuk, 20 Oktober 1979 tersebut. Lantas setelah 22 tahun berkarier di kepolisian, dirinya mempercepat untuk mundur dari Korps Bhayangkara.

Mengapa ia memutuskan pensiun dini? Dijelaskannya, bahwa sudah cukup lama ia

mempertimbangkan pemikiran itu, lantaran ingin fokus bersama keluarga dan serius melanjutkan usahanya.

Pria yang ditokohkan di kawasan Loktuan ini tak menampik, banyaknya tawaran dari partai politik untuk bergabung dengan salahsatunya. Namun ia memilih untuk tetap kebersamaan keluarganya terlebih dahulu, sebelum memutuskan apakah mengambil tawaran tersebut atau tidak.

"Ada aja beberapa partai yang menawarkan tapi saya belum jawab," bebernya.

Ia tak mau terburu-buru mengambil keputusan, karena ia akan melihat terlebih dahulu situasi politik di Kota Taman. Apabila memang berpotensi, ia mengaku ada kemungkinan untuk dirinya menerima tawaran tersebut.

"Saya serahkan semuanya kepada yang kuasa," ucapnya.

Pria 43 tahun itu pun berterima kasih kepada institusi Polri yang sudah mengayominya selama 22 tahun ini.

Editor: Yusva Alam



Ragam Reaksi Netizen Tanggapi Bioskop XXI Tayang di Citimall Bontang 11 Oktober

BONTANG – Kabar gembira bagi pecinta film di Bontang! Bioskop XXI segera tayang di Citimall Bontang. Dalam pengumuman resmi yang dibagikan melalui akun Instagram @citimall.bontang, Bioskop XXI akan mulai tayang pada tanggal 11 Oktober 2023.

"Hai Sobat XXI Bontang! Siapa yang sudah tidak sabar ingin #NontonASIKdiXXI & #JajanASIKdiXXI Citimall Bontang? Nah, karena tanggalnya semakin dekat, buruan informasikan ke teman, sahabat, pasangan, dan keluarga Anda ya."

Reaksi positif langsung mengalir di kolom komentar postingan tersebut. Netizen dengan akun @risundani bahkan menyatakan keinginannya untuk menonton film horor yang akan tayang di XXI tersebut dengan menggunakan emoji api dan menyebutkan bahwa dia akan menontonnya sendiri

(meskipun mungkin sedikit bohong).

Netizen lain dengan akun @gaizkaicecream.btg juga mengungkapkan kebahagiaannya atas kabar ini dan mengajak semua orang untuk membeli es krim di depan XXI.

Tidak hanya itu, beberapa netizen juga menginformasikan bahwa aplikasi MTIX XXI Bontang sudah dapat digunakan untuk pembelian tiket. Ini membuat proses pembelian tiket semakin mudah dan nyaman.

Antusiasme netizen ini merupakan indikasi kuat bahwa pembukaan XXI di Bontang akan menjadi alternatif hiburan yang dinantikan warga Bontang. Dengan berbagai film menarik yang akan tayang, para penonton di Bontang dapat segera menikmati pengalaman menonton film di bioskop XXI, tanpa harus pergi ke Samarinda atau Balikpapan. (RB)

Perempuan Pendorong Suara Pemilu, Asumsi atau Realitas?

Di pemilu tahun 2022 lalu, hanya 70 persen masyarakat di Kaltim yang pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 100 persen yang terdaftar memiliki hak pilih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, Sigit Alfian mengatakan, sosialisasi ini penting, karena diharapkan pada tahun 2024 mendatang 100 persen warga Kaltim yang memiliki hak pilih bisa menggunakan suaranya.

Di Kota Bontang sendiri terdapat 131.595 pemilih, pemilih laki-laki sebanyak 68.135 dan pemilih perempuan sebanyak 63.459.

"Kami pinginnya masyarakat Kaltim bisa pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya," ungkap dia di Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (18/9/23).

Alasan Kesbangpol memilih organisasi wanita Bontang sebagai peserta, karena perempuan dinilai memiliki kekuatan untuk mengajak dan menyebarkan informasi kepada keluarga dan sekitarnya.

Asumsi Demokrasi untuk Perempuan

Berbagai upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi. Termasuk salah satunya adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam peningkatan pemilih. Karena perempuan dianggap bisa mengajak orang di sekitarnya seperti anaknya, suaminya dan tetangganya.

Mengapa berbagai hal ini dilakukan, bukan karena posisi perempuannya. Namun pemerintah tidak ingin pesta demokrasi ini tidak semeriah pesta demokrasi sebelumnya. Masyarakat tidak banyak hadir ke TPS dengan berbagai alasan.

Di sisi yang lain, pemerintah tidak ingin anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 86,2 Triliun tidak disukseskan oleh para pemilih. Anggaran ini luar biasa besar, jika dibandingkan dengan pesta demokrasi tahun 2019, anggaran kali ini 3 kali lebih besar dari tahun 2019.

Sehingga wajar jika berbagai cara pun akan di tempuh. Namun perlu diketahui bahwa hal ini adalah semakin memperpanjang seremonial demokrasi. Mas-



Oleh:

**Dinnar Fitriani
Susanti**

*Aktivist Muslimah
Balikpapan*

yarakat dibuat lupa persoalan utama mereka.

Pesta demokrasi hanya memilih pemimpin yang berganti - ganti. Euforia kemenangan ini tidak dirasakan secara mendasar oleh rakyat secara bahagia. Namun hanya di rasakan oleh partai pendukung pemenang pemimpin dan oligarki di belakangnya.

Berbagai persoalan akan tetap berjalan, bahkan semakin bertambah jika demokrasi masih menjadi

jalan untuk mengatur masyarakat.

Inilah asumsi pesta demokrasi, yang menonjol yaitu rakyat termasuk perempuan dibutuhkan suara mereka saat euforia demokrasi. Namun setelah euforia selesai, maka selesailah suara mereka. Demokrasi menjunjung konsep kekuasaan melalui eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa suara rakyat adalah asumsi euforia.

Realitas, Perempuan Sejahtera dalam Aktivitas Politik Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah dan diutusny Rasulullah sebagai penyampai risalah di muka bumi. Dan Islam adalah agama yang terdiri dari akidah dan syariah, merupakan sebuah sistem yang menyeluruh.

Dalam kesempurnaan syariah inilah Islam telah memposisikan baik laki-laki dan perempuan memiliki tujuan di muka bumi untuk melaksanakan seluruh aturan Islam.

Dalam Syariah pengaturan pelaksanaan ada yang terdiri dari hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia inilah cakupan begitu luas, semisal muamalah, ekonomi, sosial, memimpin, dan di pimpin negara.

Begitu sempurnanya Islam sebagai sebuah aturan hidup, maka akan memberikan pengaruh kebaikan di muka bumi.

Hal ini telah terbukti sejak Rasulullah diutus sampai pada masa Daulah Utsmaniyah, hal ini berjalan kurang lebih sekitar 1300 tahun dan hampir merata di belahan bumi.

Islam sebagai syariah yang begitu sempurna ini pun telah mengatur kehidupan melalui hukum - hukumnya seperti wajib, Sunnah, mubah, makruh dan haram.

Dalam pelaksanaan aturan sesama manusia tidak terlepas dari aktivitas politik, yang di sebut dengan riayah suunil ummah (mengurus urusan ummat). Aktivitas ini seperti muhasabah, memberikan masukan, menasehati serta komplain atas pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini yang dimaksud adalah syariah Islam itu sendiri. Aktivitas politik ini tidak di batasi waktu dan tempat. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan syariah, maka wajib bagi umat untuk mengingatkan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab di hadapan Allah dan juga sebagai wujud menghormati pemimpin agar selamat dunia dan akhirat.

Dan aktivitas politik ini pun tentu saja melekat pada laki-laki juga perempuan sebagai umat atau warganegara. Sebagai mana pernah terjadi pada masa Umar sebagai Khalifah. Pada masa kepemimpinannya Umar pernah menetapkan mahar. Namun Al Khansa mengingatkan Umar agar jangan menetapkan mahar yang merupakan hak untuk perempuan. Disinilah Al Khansa sebagai wakil dari perempuan untuk menyampaikan komplain atas kebijakan pemimpin pada masa itu.

Di kisah yang lain pula, pada saat proses baiat aqabah, ada dua orang perwakilan perempuan dari tujuh puluh orang laki-laki, salah satunya adalah Nusbah. Proses baiat ini adalah proses perwakilan dari para perempuan untuk memberikan loyalitasnya untuk bersedia di atur dengan Syariah Islam sebelum Rasulullah menjadi kepala Negara di Madinah.

Dan masih banyak lagi kisah yang menceritakan bagaimana aktivitas politik yang dilakukan oleh perempuan selama peradaban Islam. Sejatinnya Islam telah menden-garkan dan memberikan kesejahteraan kepada perempuan secara realitas dan nyata. Hal itu terjadi karena Islam adalah agama yang di turunkan untuk manusia, baik untuk laki-laki dan perempuan.

Dan aktivitas politik ini merupakan bagian dari ibadah. Ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena bagian dari pelaksanaan aturan Syariah.

(*)



TATA TAMAN KOTA, TAK PERLU DIPAGAR



**TEKAN KASUS PERUNDUNGAN
DI SEKOLAH, RUDI: PERLU PERAN
ORANG TUA DAN GURU**



Taman Sanggam yang berada di Jalan Pangeran Diguna Kelurahan Bugis.

TATA TAMAN KOTA, TAK PERLU DIPAGAR

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris meminta pemerintah daerah untuk melakukan penataan taman-taman kota. Sehingga lebih indah dan dapat difungsikan dengan baik.

Dirinya menyayangkan taman kota yang dipagar. Menurutnya konsep taman merupakan ruang terbuka hijau yang mana masyarakat dapat bebas untuk pergi ke taman.

"Banyak taman-taman bagus di Indonesia, tapi tidak ada konsep taman itu dipagar. Di daerah lain tidak ada taman dikasih pagar," katanya, Rabu (4/10/2023).

Dirinya mencontohkan, seperti Taman Cendana dan Taman Sanggam yang terpagar. Dikatakannya, justru lebih mirip seperti kebun dari pada taman.

Waris menilai taman kota perlu ditata kembali supaya ruang terbuka hijau bisa didatangi siapapun. Jika nantinya taman tersebut menjadi lokasi muda mudi berpacaran itu menjadi urusan lain. Sebab, itu tergantung pengelo-

laannya bagaimana.

"Kalau nanti jadi tempat maksiat atau pacaran urusan lain. Tergantung pengelolaannya. Kalau semakin bagus maka semakin ramai, ya tidak mungkin orang berbuat macam-macam disitu," jelasnya.

Setelah pemerintah gencar melakukan penataan kawasan kota, pihaknya meminta juga untuk menata taman-taman yang ada. Pun ditegaskan jangan lagi dipagar.

"Taman kota lan ruang terbuka untuk masyarakat, bisa jadi tempat nongkrong atau diskusi," terangnya.

Kendati begitu, pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah yang terus melakukan penataan kawasan perkotaan. Serta Kecamatan Tanjung Redeb sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Berau sekaligus pusat pariwisata perkotaan.

"Makanya taman termasuk tepian perlu direvitalisasi supaya lebih bagus," tandasnya. (Adv)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

DUKUNG TURNAMEN ESPORT, WARIS HARAP DAPAT DILAKUKAN HINGGA WILAYAH PEDALAMAN

TANJUNG REDEB - Kegiatan Pesisir Turnamen Esport Indonesia (Esi) Beberapa waktu lalu direpons positif Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

Dia menerangkan, merujuk pada data yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), jumlah atlet di Berau mencapai 2.000 orang. "Faktanya ini sebuah olahraga yang tidak bisa dianak tirikan. Makanya kita perlu bina anak muda Berau, bagaimana bisa melahirkan atlet berprestasi," ungkapnya.

Lanjutnya, tidak hanya sebagai sarana olahraga dan silaturahmi, kompetisi seperti ini diharapkan juga sebagai ajang promosi pariwisata di pesisir. Tidak menutup kemungkinan akan dibuat event se-Kaltim di Kabupaten Berau.

"Kita dukung lah dari DPRD kegiatan olahraga elektronik ini, sebagai sarana olahraga dan silaturahmi," ucapnya.

Menurut Waris, dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan Pesisir Turnamen 2023 kali ini sangat bagus. Ke depan diharapkannya turnamen ini bukan hanya dilakukan di pesisir saja tapi juga ke pedalaman. Kecamatan Biatan kali ini dipilih sebagai lokasi turnamen lantaran posisinya yang berada ditengah-tengah lima kecamatan yang ada di pesisir Selatan Berau.

"Saya kira pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan seperti ini sudah sangat bagus.

Apalagi di kota juga sudah sering ada turnamen," sebutnya.

Kendati demikian, untuk mendukung lahirnya atlet olahraga elektronik di pedalaman juga perlu didukung dengan sarana telekomunikasi yang memadai. Seperti diketahui Berau belum sepenuhnya bebas blankspot, terutama daerah-daerah pedalaman.

Di lain sisi, pihaknya selaku Komisi III DPRD Berau terus mendukung OPD terkait untuk menuntaskan blankspot. Baik melalui bantuan pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Apalagi program unggulan 1.000 titik WiFi Pemkab Berau sudah selesai. Inilah waktunya untuk fokus pada penanganan blankspot.

"Sekarang kan 1.000 titik WiFi sudah rampung, kita minta pemda baik dari bantuan swasta ataupun pemerintah pusat untuk menyelesaikan blankspot ini," tegasnya.

Ke depan selain untuk mendukung terbentuknya atlet olahraga elektronik Berau, tentunya juga akan memudahkan kegiatan pemerintahan kampung yang saat ini sudah serba digital.

"Saya kira harus punya targetlah minimal 2025 tidak ada lagi blankspot di Berau. Karena kita harus merdeka sinyal. Teknologi ini sangat penting, sektor pemerintahan juga sekarang sudah berbasis teknologi," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

CEGAH BANJIR, RATNA KALALEMBANG PERJUANGKAN PROGRAM DRAINASE

TANJUNG REDEB - Masih banyaknya wilayah yang menjadi langganan banjir di pusat perkotaan Kabupaten Berau disorot Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menuturkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah harus menyusun program normalisasi yang dapat dilaksanakan di kawasan rawan terjadi banjir.

"Karena kita ketahui, program normalisasi itu bertujuan untuk membuat drainase menjadi lebih baik saat volume air meningkat," jelasnya.

Dirinya menerangkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya arus air yang terhambat akibat jalur yang tertutup lumpur atau sampah.

"Maka dari itu, normalisasi perlu dilakukan agar masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan banjir merasa nyaman," tuturnya.

Politikus Golkar ini menambahkan, jika banjir masih sering terjadi, maka akan merusak pemandangan perkotaan Tanjung Redeb. Hal itu dinilainya cukup miris.

"Kalau banjir sering terjadi, saya khawatir berbagai penyakit mudah menyerang masyarakat. Sehingga saya ingin program drainase ini bisa diperjuangkan," tegasnya.

Kendati demikian, Ratna berharap masyarakat dapat menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). "Agar tidak mudah terserang penyakit, terlebih seperti cuaca saat ini," tandasnya. **(adv/set)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

TEKAN KASUS PERUNDUNGAN DI SEKOLAH, RUDI: PERLU PERAN ORANG TUA DAN GURU

TANJUNG REDEB - Kasus perundungan di sekolah yang viral di media sosial diharapkan Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong tak terjadi di sekolah yang ada di Berau.

Dia mengatakan, agar kasus perundungan dapat dicegah, dibutuhkan pengawasan ketat oleh guru dan kepala sekolah. Pasalnya, jika hal tersebut terjadi akan memengaruhi mental korban.

"Agar dapat dicegah, sebaiknya para siswa diberikan materi mengenai perilaku sosial yang baik dan benar, sebelum memulai pembelajaran," katanya.

Dirinya menilai, dengan sudah diterapkannya metode kurikulum merdeka

yang telah diterapkan pemerintah pusat dapat mencegah terjadinya perundungan.

"Tetapi yang berpengaruh untuk perilaku baik seorang anak itu adalah orang tua, sebaiknya karakter anak diawasi sebelum mereka hidup bersosial," ujarnya.

Politikus PDI-P ini berharap orang tua berperan penuh terhadap pembentukan perilaku anak. Pasalnya, karakter anak terbangun dari lingkungan rumah.

"Karena kita tidak ingin ada kasus perundungan di Berau. Jika ada saya harap pelaku ditindak tegas sesuai peraturan undang-undang yang berlaku," pungkasnya. **(adv/set)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

ILEGAL FISHING MARAK, SAGA HARAP GERAK CEPAT OPD TERKAIT

TANJUNG REDEB – Maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan Bumi Batiwakkal menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia mengatakan, jika kasus tersebut tidak ditindak secara cepat akan berakibat fatal terhadap ekosistem terumbu karang. Sehingga dapat menimbulkan efek buruk ke sektor pariwisata.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus bisa segera beri tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing. Jangan sampai dibiarkan dan dapat merugikan sektor pariwisata kita," ungkapnya.

Saga menegaskan, jangan sampai pelaku destructive fishing juga beraksi ke perairan Pulau Derawan dan Maratua. Sebab, kata dia, dua wilayah tersebut merupakan destinasi wisata andalan Kalimantan Timur dan Berau.

"Kalau mereka juga melakukan pengeboman di sana, keindahan terumbu karang kita akan terdampak. Ini harus diperhatikan," tegasnya.

Diterangkannya, wisatawan mancanega-

ra mengunjungi Pulau Derawan dan Maratua untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Jika rusak akibat pengeboman ikan, maka akan menurunkan minat pelancong untuk berkunjung.

"Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kita harus bersama-sama mencegah pengeboman ikan tersebut," ujarnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta OPD terkait berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan untuk mencegah aktivitas pengeboman ikan.

"Pelakunya harus diberikan tindakan tegas, supaya ke depannya tidak ada lagi praktik-praktik pengeboman ikan di perairan kita," katanya.

Kendati demikian, Saga berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencegah pengeboman ikan. Sebab, penggunaannya dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitarnya.

"Selain itu juga menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran ikan di sekitarnya. Saya harap pihak terkait segera menindaknya," tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno.

SUHARNO HARAP PEMERINTAH REALISASIKAN SD FILIAL DI KAMPUNG LABANAN

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno mendorong pemerintah memaksimalkan infrastruktur penunjang pendidikan. Tujuannya agar sektor tersebut lebih maju.

Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memikirkan kemajuan dunia pendidikan Bumi Batiwakal.

Berkaitan dengan hal itu, dirinya mengusulkan pembangunan SD Filial di Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur. Usulan tersebut ditegaskannya harus diprioritaskan.

Suharno menerangkan, usulan itu disampikannya bukan tanpa sebab. Pasalnya sekolah yang ada cukup jauh, bahkan para pelajar harus menempuh jarak sekisar 9 kilometer.

"Pada intinya yang utama harus ditingkatkan adalah infrastruktur, jika infrastrukturnya memadai, saya yakin kualitas pendidikan kita juga akan semakin meningkat,"

tuturnya.

Menurutnya, karena jarak tempuh menuju sekolah yang cukup jauh, membuat sebagian orang tua siswa terbebani. "Apalagi mereka bekerja di kebun, tentu dengan antar jemput sekolah merasa berat. Jadi saya harap SD Filial ini direalisasikan," katanya.

Tak hanya itu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku sudah pernah melakukan pengecekan ke lokasi yang telah diusulkan untuk pembangunan SD Filial tersebut lalu.

Adapun luas lahan yang diwakafkan oleh pemerintah kampung kepada Pemkab Berau adalah sekitar 4 hektare. Begitu juga untuk perencanaan telah dianggarkan pada tahun 2022 dan menunggu penganggaran untuk pembangunannya.

"Semoga rencana pembangunan SD Filial ini bisa segera direalisasikan, agar masyarakat di Labanan Makmur dan Labanan Jaya, bisa segera menikmati fasilitas pendidikan yang tidak jauh dari pemukiman mereka," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

WARIS MINTA EKSEKUTIF EVALUASI PROGRAM 1.000 TITIK WIFI GRATIS

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah merealisasikan 1.000 titik WiFi gratis pada tahun ini. Hal itu diapresiasi Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

Dia menilai, dengan adanya 1.000 titik WiFi gratis tersebut, sangat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas di zaman serba internet seperti saat ini.

"Setiap kampung dapat, minimal di kantor pemerintah kampung harus ada," ungkapnya.

Dirinya meminta eksekutif untuk mengevaluasi daerah yang belum menikmati WiFi gratis tersebut. Khususnya wilayah pariwisata maupun tempat umum lainnya.

"Nanti akan diusulkan lagi. Kami ingin ditambahkan lagi, selama anggaran masih mencukupi," ujarnya.

Politikus Demokrat ini meminta komitmen Pemkab Berau agar pemasangan WiFi gratis ini tak hanya sekadar simbolis, namun tidak dapat digunakan masyarakat.

"Jangan memakan anggaran yang tak

sedikit, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat secara luas," katanya.

"Jika hanya untuk pemenuhan janji politik saja, namun tidak dapat digunakan ya buat apa," sambungnya.

Ditanya terkait besaran anggaran yang dikeluarkan Pemkab Berau untuk pembayaran 1.000 titik WiFi gratis itu, Waris menyebut sekisar Rp 10 miliar per tahunnya.

"Pemerintah harus komitmen. Jumlah pembayaran itu cukup besar, sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan dan juga dikhawatirkan nanti tidak dibayar," imbuhnya.

Kendati demikian, untuk daerah yang masih dalam status blank spot, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak provider. Karena, masih banyak wilayah Berau yang minim soal jaringan internet.

"Selama ini wilayah yang belum mendapat jaringan hanya mengandalkan satelit atau tempat tertentu. Untuk itu akan kita diskusikan bersama pemerintah untuk penyelesaiannya," tandasnya. **(adv/dez)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

ANDI AMIR HARAP ADA REGENERASI PETANI

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan.

Dia mengatakan, penyerahan bantuan tersebut bertujuan membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. "Supaya mereka juga semakin semangat," ungkapnya.

Dirinya mengharapkan dengan adanya bantuan alat pertanian itu, memicu regenerasi petani. Selain itu juga sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

"Ini juga merupakan bentuk sebagian kecil dari realisasi serapan aspirasi yang sempat

saya lakukan beberapa waktu lalu di kampung tersebut," terangnya.

Andi Amir membeberkan, hingga saat ini petani di Suka Murya belum mendapat perhatian dari pihak mana pun. Hal inilah yang mendorong dirinya, untuk turun ke lapangan menyapa petani, dan menyerahkan bantuan.

"Benar, saya banyak dapat laporan dari masyarakat akan hal ini. Makanya saya coba datang, dan menyerahkan bantuan ini," tuturnya.

Pada saat melaksanakan reses, kata dia, banyak menerima keluhan masyarakat warga yang mengaku tidak pernah tersentuh oleh bantuan apapun dari pemerintah.

"Saya prihatin dengan peristiwa yang menimpa masyarakat di sini. Apalagi, mayoritas mas-

yarakat menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun," katanya.

"Sementara saya bantu sebisa mungkin. Meskipun tidak seberapa, setidaknya petani di sana bisa memiliki dorongan semangat bekerja dari apa yang di perbantuan," tambahnya.

Politikus Golkar ini berharap, masyarakat dapat memaksimalkan bantuan yang diberikan saat ini. "Ini hanya sebagian kecil. Adapun aspirasi lainnya tentu tetap akan saya kawal dan perjuangkan," tegasnya.

Permasalahan regenerasi petani juga menurut Andi Amir perlu dilakukan, agar petani yang sudah berumur, bisa menikmati masa tuanya. "Jika petani muda malu, kasihan petani yang sudah tua, harus turun ke lapangan. Tidak usah malu," tandasnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

ICHSAN DORONG EKSEKUTIF BERI DUKUNGAN YANG MASIF UNTUK DUNIA LITERASI

TANJUNG REDEB - Dunia literasi sangat berpengaruh terhadap ilmu yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi mendorong eksekutif untuk memberi dukungan yang masif.

Dia menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus fokus kepada perkembangan literasi di Bumi Batiwakkal. Pasalnya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Literasi itu penting, apalagi kebodohan telah banyak memakan korban. Kita harus rajin baca buku, baik itu bentuk fisik maupun digital," katanya.

Dirinya mengaku merasa prihatin. Sebab masih minimnya tenaga perpustakaan yang mengantongi akreditasi. Termasuk perpustakaan yang sudah berjenjang nasional.

"Hal itu saya ketahui setelah mendengar pemaparan Ketua Atpusi Berau, Mariani saat

festival literasi beberapa waktu lalu," ungkap pria yang juga Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Berau ini.

Ichsan menilai, pustakawan harus orang-orang yang profesional di bidangnya. Maka dari itu, kata dia, tenaga perpustakaan yang terakreditasi perlu ditingkatkan.

"Termasuk perpustakaan sekolah yang belum bertaraf nasional ini yang harus juga kita perhatikan, bagaimana langkahnya, paling tidak dengan menambah koleksi buku-buku baru dan terpopuler," ungkapnya.

Agar keinginan tersebut tercapai, tentunya, diperlukan minat yang tinggi oleh anak didik. Untuk menariknya, perpustakaan harus modern.

"Jadi kita pancing dulu minatnya dengan edukasi yang bagus, ditambah fasilitas pendukung. Makanya perpustakaan juga harus bisa bertransformasi dengan lebih baik dan modern," tutupnya. (adv/dez)



:Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

KETUA DPRD BERAU TEGASKAN JANGAN ADA PERBEDAAN DI DUNIA PENDIDIKAN

TANJUNG REDEB - Sektor pendidikan dinilai Ketua DPRD Berau, Madri Pani harus lebih diperhatikan. Sebab, kualitas sangat berpengaruh terhadap suatu kemajuan bangsa.

Dikatakannya, saat ini pembangunan sekolah selalu dilakukan di perkotaan. Hal itu menurutnya membuat sekolah yang ada di wilayah perkampungan merasa iri.

"Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya ada di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah yang ada di Berau ini layak jadi tempat belajar dan mengajar," ungkapnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus mak-

simal dalam mengelola anggaran untuk pendidikan. Lebih 20 persen dari APBD digelontorkan untuk sektor tersebut.

"Dengan besarnya APBD kita ini justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan," imbuhnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem) ini menyebut, proses belajar mengajar harus maksimal. Jangan sampai, kata Madri, ada perbedaan di dunia pendidikan kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Padahal pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Jangan ada perbedaan antara yang di perkotaan dan perkampungan. Saya harap ini jadi perhatian," tandasnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya.

WENDY TEGASKAN KEPALA DAERAH HARUS SELEKTIF DALAM MEMBAGI ANGGARAN KE OPD

TANJUNG REDEB - Kepala daerah diharapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya selektif dalam membagi anggaran ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, seharusnya anggaran diprioritaskan ke OPD yang memiliki rencana kerja paling bermanfaat dan penting untuk masyarakat secara luas.

Dia membeberkan, saat pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS beberapa waktu lalu, banyak program yang timbal balik ke masyarakat dalam jangka panjang sangat minim.

"Seharusnya program kerja yang mempunyai timbal baik untuk orang banyak perlu diprioritaskan. Seperti contoh penanganan TPA dan bantuan pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani," katanya.

Wendy juga menyebut, mengenai bantuan untuk pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau mengharapkan bantuan dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.

"Tetapi kalau dari dewan, jumlahnya itu terbatas. Berbeda jika proker tersebut masuk ke dalam APBD," terangnya.

"Karena pokir dewan tidak bisa disamakan dengan program kerja yang memang asalnya dari bupati, karena kami memiliki hak masing-masing untuk mengelola anggaran," tambahnya.

Dengan demikian, visi dan misi kepala daerah yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut Wendy perlu selaras dengan program kerja OPD. Hanya saja kendala anggaran yang tidak sesuai membuat beberapa OPD kerap kesulitan saat akan action di lapangan.

"Tentu semua itu kan memakai anggaran, OPD nya ngeluh sama kami. Setelah kami telaah kondisinya juga begini (anggaran minim, red). Sementara yang sangat kami sayangkan ada OPD lain yang tidak begitu bermanfaat program kerjanya itu anggarannya besar," pungkasnya. (adv/dez)



PENGETAP BBM DI BALIKPAPAN DITANGKAP, JUAL BENSIN BERSIBSIDI KE POM MINI



**KOMISI III DPRD BALIKPAPAN
KECEWA, BANYAK PIPA PDAM
PATAH AKIBAT PROYEK DAS AMPAL**



Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi bersama pelaku pengetab BBM jenis Peralit, RM menunjukkan barang bukti.

PENGETAP BBM DI BALIKPAPAN DITANGKAP, JUAL BENSIN BERSIBSIDI KE POM MINI

BALIKPAPAN - Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal (Tipiter Satreskrim) Polresta Balikpapan berhasil mengamankan seorang pria berinisial RM (22) atas tindakan pengetapan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite pada Kamis (21/9/2023) lalu.

RM ditangkap saat tengah menjalankan aksi pengetapannya di kawasan Gunung Malang, Balikpapan Tengah pada pukul 20.00 Wita. Saat digeledah petugas, RM hanya bisa pasrah.

"Kita amankan pelaku saat memindahkan BBM jenis Peralit di tanki mobilnya ke jeriken yang sudah disiapkannya," ujar Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut Wirawan menjelaskan, ditangkapnya RM berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdapat sebuah mobil Toyota Kijang Krista dengan nopol KT 1033 DF yang berulang kali mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Gunung Malang.

"Modusnya membeli Peralite dan

menumpahkannya ke jeriken yang ada di dalam mobilnya dengan mesin pompa kecil yang ada di dalam mobilnya juga," jelasnya.

Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengetab serta 22 unit jeriken dengan total keseluruhan BBM jenis Peralite sebanyak 500 liter.

"Pelaku dan barang bukti langsung kita amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui RM sudah beraksi selama 3 bulan. BBM jenis Peralite yang dibelinya dari SPBU, kembali dijual ke para pemilik Pom Mini dengan harga Rp 11.500 per liter.

"Atas perbuatannya kita jerat dengan Undang-undang Minerba, di mana ancaman kurungan penjaranya sampai 7 tahun dan dendanya sampai Rp 1 miliar," tutup Wirawan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Bantuan air bersih dari Polresta Balikpapan dan IJTI Balikpapan kepada warga terdampak kesulitan air bersih selama kemarau.

DAMPAK KEMARAU, POLRESTA DAN IJTI KOTA BALIKPAPAN BERIKAN BANTUAN AIR BERSIH UNTUK WARGA

BALIKPAPAN - Musim kemarau yang berkepanjangan, dampak dari fenomena El Nino menyebabkan sebagian warga Kota Balikpapan saat ini tengah mengalami kesulitan air bersih. Salah satunya seperti di kawasan Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah.

Ketua RT 9 Kelurahan Karang Jati, Abdul Jalil mengatakan, sejak dua pekan lalu air bersih dari PDAM sudah tidak mengalir lagi. Sebagian masyarakat harus membeli air bersih dari swasta.

"Warga sudah mengalami kesulitan air bersih sejak dua pekan yang lalu," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Atas hal tersebut, Polresta Balikpapan bersama Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Balikpapan membagikan air bersih gratis kepada warga terdampak.

Jalil menjelaskan, warga sangat bersyukur dengan adanya bantuan air bersih tersebut, di mana warga yang kesulitan air

bersih akhirnya bisa mendapatkan air bersih lagi.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto yang sempat melepas kendaraan bantuan air bersih kepada warga mengaku jika hal ini pun merupakan rangkaian dari kegiatan Peringatan HUT Ke-72 Humas Polri. Di mana kegiatan ini sengaja bekerjasama dengan IJTI Kota Balikpapan.

"Kita berikan bantuan air bersih sebanyak 7 mobil pick-up yang membawa masing-masing satu tandon berkapasitas 1.200 liter. Dan satu unit kendaraan taktis Armored Water Canon (Rantis AWC) Polresta Balikpapan berkapasitas 6.500 liter air," ujar Kapolresta Balikpapan.

Bantuan air bersih ini diberikan kepada 7 RT di Kelurahan Karang Jati, mulai dari RT 5 hingga RT 12. Selain bantuan untuk kebutuhan untuk warga sekitar, air bersih ini juga diberikan ke rumah ibadah seperti masjid.

"Kegiatan bakti sosial ini mer-

upakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan air bersih," jelasnya.

Salah satu warga penerima bantuan air bersih, Siti Aminah, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan.

"Terima kasih kepada Polresta Balikpapan dan IJTI Balikpapan yang telah memberikan bantuan air bersih kepada kami. Air bersih ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Sementara itu, Ketua IJTI Kota Balikpapan, Riswan Danu mengatakan, bantuan ini sangat dibutuhkan warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama musim kemarau ini.

"Harapan kami bantuan ini dapat bermanfaat untuk warga, di tengah kesulitan mereka untuk mendapatkan air bersih," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Sejumlah anggota Komisi III DPRD Balikpapan saat melakukan tinjauan di Jalan MT Haryono, tepatnya di DAS Ampal.

KOMISI III DPRD BALIKPAPAN KECEWA, BANYAK PIPA PDAM PATAH AKIBAT PROYEK DAS AMPAL

BALIKPAPAN - Sering dikeluhkan masyarakat yang melintas di Jalan MT Haryono tepatnya proyek DAS Ampal yang tak kunjung selesai dikerjakan, debu dan kemacetan selalu terjadi di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Balikpapan pun bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan serta pihak konsultan proyek melakukan tinjauan lapangan ke lokasi pekerjaan DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim mengatakan, setelah meninjau langsung ke lokasi, banyak persoalan yang berkaitan dengan patahnya pipa-pipa PDAM akibat pekerjaan dari kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa.

"Melihat kondisi di lapangan, tentu kami merasa kecewa, bahkan tidak bisa berkata-kata lagi dengan kelakuan kontraktor," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Dijelaskan Kamaruddin Ibrahim, akibat pekerjaan PT Fahreza Duta Perkasa tersebut membuat Kota Balikpapan menjadi rusak. Karena satu lokasi pekerjaan belum selesai, sudah merusak lokasi yang lain. Dan itupun dilakukan hanya untuk mengejar progres.

"Kami sudah kehabisan kata untuk PT Fahreza ini, silakan masyarakat saja yang menilainya, apa yang harus dilakukan pemerintah," jelas Kamaruddin.

Menurutnya, langkah yang diambil DPRD

Balikpapan sudah dilakukan dengan merekomendasikan untuk putus kontrak sejak awal, namun tidak diindahkan. Bahkan, teguran setiap sidang juga sering diberikan, namun karena PT Fahreza ini kontraktor yang bandel, jadi tidak menghiraukannya.

"Jadi kami menunggu ketegasan dari Pemerintah Kota aja, seperti apa ke depannya menyikapi hal ini," tambahnya.

Bahwa keputusan untuk memutus kontrak PT Fahreza Duta Perkasa ini ada di Pemerintah Kota. Namun DPRD Balikpapan sudah menyuarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan debu, kemacetan, kerusakan jalan, estetika kota dan juga kerusakan pipa PDAM.

"Apalagi pipa yang sudah disambung, kembali putus di tempat lain, itu karena pekerjaannya serampangan," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari DPU dan konsultan, bahwa PT Fahreza Duta Perkasa tidak mengindahkan semua perintah yang diberikan. Untuk itu, ia minta agar Wali Kota Balikpapan bisa bersikap tegas terhadap kontraktor, karena hal seperti ini tidak bisa dibiarkan.

"Jadi kami tunggu ketegasan Pemerintah saja, karena bolanya ada di Wali Kota," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Dinkes Kaltim memaparkan evaluasi APBD.

DINKES KALTIM GELAR EVALUASI APBD TAHUN 2023

BALIKPAPAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kaltim, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian indikator kinerja," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Dinkes Kaltim melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan dan memasukkan hasil pantauan dan evaluasi itu ke aplikasi Evapor Bappeda.

Dalam kegiatan pemantauan-evaluasi itu juga membahas rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia layanan.

"Kami harus menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018," ungkapnya.

Menurutnya, RUP harus dimuat dalam aplikasi SIRUP dan dapat ditambahkan dalam situs web, papan pengumuman, surat kabar, atau media lain. RUP juga harus diperbarui jika

ada perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa itu juga wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Perpres No. 12/2021.

Produk dalam negeri yang digunakan harus memiliki nilai TKDN ditambah BMP minimal 40 persen. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian perindustrian.

"Pengadaan barang impor hanya dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik," imbuhnya.

Menurut informasi, Dinkes Kaltim juga mendapatkan paparan dari narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi Dinkes Kaltim dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengadaan barang/jasa.

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



**KETIDAKINGINAN PENGHAPUSAN PTT HINGGA
PENINGKATAN TELEKOMUNIKASI DI PASER,
HARAPAN BUPATI
UNTUK PJ GUBERNUR**



**PASER SIAP LAKUKAN
PERCEPATAN DIGITALISASI**



Bupati Paser, Fahmi Fadli (kanan) bersama Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (tengah)

KETIDAKINGINAN PENGHAPUSAN PTT HINGGA PENINGKATAN TELEKOMUNIKASI DI PASER, HARAPAN BUPATI UNTUK PJ GUBERNUR

PASER - Bupati Paser, Fahmi Fadli, memberikan dukungannya atas pesan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2018-2023, Isran Noor, untuk tidak dilakukan penghapusan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer.

Hal tersebut disampaikan, se usai Bupati Paser menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, di Gedung Convention Hall Samarinda, Rabu (4/10/2023).

Fahmi juga turut berkomitmen untuk tidak menghapus PTT dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. "Saya sepakat dengan Gubernur. Pada masa jabatannya untuk tidak menghapus. Bahkan kami menacanakan meningkatkan statusnya menjadi PPPK," terangnya.

Ia mengharapkan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang saat ini menjabat dapat memberikan perhatian kepada daerah utamanya pada daerah yang masih memiliki desa yang minim infrastruktur seperti di Kabupaten Paser.

"Infrastruktur yang minim, tentunya akan berpengaruh pada angka kemiskinan serta

rendahnya indeks pembangunan di desa," tambahnya.

Kabupaten Paser saat ini, kata Fahmi masih banyak desa dengan infrastruktur minim utamanya dalam hal jaringan telekomunikasi dan internet yang akan berimbas pada percepatan digitalisasi desa.

Disamping itu, perkembangan digitalisasi merupakan satu tuntutan yang harus dilaksanakan, karena saat ini sudah jamannya keterbukaan informasi. "Jika tidak terpenuhi maka daerah akan menjadi tertinggal," harapnya.

Sejauh ini, Pemkab Paser telah mengambil langkah dalam mengentaskan blank spot dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Bahkan telah menggelontorkan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser.

Gelontoran anggaran itu untuk melakukan pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet. "Kami sudah kucurkan sejumlah anggaran untuk mengatasi masalah blank spot, dengan membangun jaringan telekomunikasi dan internet yang mengalami blank spot," ucapnya. (bs)



Bupati Paser, Fahmi Fadli saat ikuti Rakornas P2DD

PASER SIAP LAKUKAN PERCEPATAN DIGITALISASI

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser turut melakukan percepatan perluasan digitalisasi hingga menjangkau pelosok sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta baru-baru ini.

Berdasarkan survei, baru 399 kabupaten/kota Indonesia atau 73,6 persen yang telah melakukan digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah. Sedangkan di wilayah Kalimantan, baru 32 kabupaten/kota atau 52,2 persen.

Berdasarkan hasil Rakornas P2DD, pemerintah pusat menargetkan 75 persen pemerintah daerah menerapkan digitalisasi pada tahun 2023. Bupati Paser, Fahmi Fadli, menilai digitalisasi bakal berdampak terhadap perkembangan kemajuan daerah.

"Tentunya jika hal ini telah terealisasi, tingkat pembangunan ekonomi digital dan

infrastruktur digital di Paser akan semakin maju," tuturnya usai mengikuti Rakornas, Selasa (3/10/2023).

Pembangunan ekonomi digital maupun infrastruktur digital dianggap sebagai instrumen pendukung pemulihan ekonomi guna mencapai status negara maju. Utamanya juga berfokus pada bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Karena infrastruktur digital serta infrastruktur lainnya hanya dapat meningkatkan produktivitas apabila didukung SDM yang baik," sebut Fahmi menguraikan instruksi Menkeu.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tambah lagi, tentu harus dilaksanakan dan didukung dengan instrumen penting di daerah. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD daerah, terdapat ketidakselarasan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan, Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dikenal dengan Undang Undang HKPD, bertujuan mengharmoniskan belanja pusat dan daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Untuk itu, pondasi penting yang harus dilakukan yakni, melakukan sinergi Badan akun standar (BAS) dan pemanfaatan Platform digital. Kemenkeu ingin setiap daerah memiliki kode digitalisasi yang sama, sehingga seluruhnya bisa sinkron.

"Sinergi Badan Akun Standar (BAS) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara. Dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaporan," tandasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS

5 OKT 2023



TITIP PESAN KEPADA GUBERNUR KALTIM, ISRAN NOOR : JANGAN HAPUS TENAGA HONORER

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

ARIE
WIBOWO



Gubernur Kaltim 2018-2023 Isran Noor

TITIP PESAN KEPADA GUBERNUR KALTIM, ISRAN NOOR : JANGAN HAPUS TENAGA HONORER

SAMARINDA - Isran Noor menitipkan pesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik pada gelaran Serah Terima Jabatan Gubernur Kaltim, Rabu (4/10/2023). Ia menyampaikan untuk tidak menghapus tenaga honorer di Kaltim.

Isu penghapusan tenaga honorer memang menjadi fokus Isran untuk diperjuangkan. Ia bahkan menginisiasi pembahasan penghapusan tenaga honorer bersama Menpan-RB beberapa waktu lalu.

"Yakin kalian tidak akan dihapus. Kalau ada yang niat hapus baik honorer dan PPPK hati-hati, busung," ucapnya saat menyampaikan sambutan.

"Saya bersumpah walau tidak ada kewenangan lagi, tidak ada honorer yang dihapus. Setuju?" sambungnya.

Isran mengatakan bahwa alasan mempertahankan tenaga non ASN mengingat jumlah honorer yang cukup besar di Indonesia men-

capai 4 juta orang. Bila harus dihapus akan ada implikasi ekonomi yang akan terjadi. Bila perlu sebut Isran, honorer yang mempunyai kapabilitas diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

"Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), sama aja kalau nggak diangkat kecelakaan," ucapnya,

Ia turut menyampaikan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, untuk bersikap arif kepada jajaran Pemprov Kaltim. Terkhusus kepada jabatan struktural di Organisasi Perangkat Daerah.

"Ada yang jadi Pj Gubernur, dia ganti sekedarnya. Padahal jabatan struktural itu tidak ada kaitannya dengan politik. Bukan bermaksud menasehati, saya yakin (Akmal Malik) bagus dan sangat bijaksana," tandasnya.

Pewarta : Andi Deskry
Editor : Nicha Ratnasari



Isran Noor dan Akmal Malik saat Serah Terima Jabatan, Rabu (4/10/2023).

PJ GUBERNUR KALTIM AKMAL MALIK SEBUT ISRAN NOOR PEMIMPIN SEJATI

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, menyanjung Isran Noor sebagai pemimpin sejati. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan raihan-raihan yang telah diraih Isran- Hadi termasuk tidak memberhentikan pegawai di Pemerintahan Kaltim.

Dalam sambutannya, Akmal Malik mengatakan dirinya harus membacakan sambutan menggunakan naskah, karena dirinya adalah birokrat yang ditunjuk oleh Presiden. Berbeda dengan Isran yang tanpa teks pidato karena merupakan pemimpin sejati yang dipilih masyarakat.

"Mohon maaf Pak Isran saya harus menggunakan pidato, bedanya birokrat dengan pemimpin sejati seperti itu. Kalau pemimpin sejati itu tidak seperti saya pak, hati-hati sekali harus berpidato karena beliau rill dipilih masyarakat kalau saya ditunjuk oleh Presiden jadi saya harus berhati-hati karena saya membawa nama pak menteri jadi mohon maaf saya harus membawa kertas untuk membawa apa yang harus saya sampaikan," jelas Akmal Malik.

Di bawah kepemimpinan Isran -Hadi, sebut Akmal Malik, Kaltim meraih sejumlah prestasi mulai dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga memastikan Ibu Kota Negara (IKN) hadir

di Kaltim. Untuk itu ia berkomitmen untuk mempertahankan dan melanjutkan apa raihan Kaltim di era Isran -Hadi.

"Saya biasa membuat kebijakan. Menjadi seorang eksekutor sangat tidak mudah memiliki aktor seperti Pak Isran ini tidak semua daerah bisa. Kaltim itu beruntung punya Pak Isran- Hadi dalam mengolah sistem. Ketika aktornya bagus, regulasinya buruk sekalipun sistemnya pasti akan bagus," sanjungnya.

Akmal mengaku Kaltim menjadi "rebutan" karena raihan prestasinya. Di masa jabatannya yang kurang lebih mencapai satu tahun kelak, ia akan memanfaatkan untuk belajar untuk membuat kebijakan yang lebih relevan bila kembali bekerja di Kemendagri.

Selain berkomitmen untuk mempertahankan raihan yang telah di raih Isran-Hadi, ia juga berjanji untuk tidak mencopot pegawai di Pemerintahan Provinsi Kaltim sebagaimana yang dipesankan Isran Noor.

"Sekali lagi saya sepakat dengan Pak Isran, ini bukan kami datang untuk berhenti itu tidak ada. Sekali lagi bos aman tekendali. Cuma kalau melanggar bukan saya tapi aturan," pungkasnya.

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Serah terima Pj Gubernur kepada Akmal Malik.

AKMAL MALIK APRESIASI KINERJA ISRAN-HADI DI TENGAH PANDEMI SILAM

SAMARINDA - Akmal Malik resmi menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi lalu.

"Saya merasa sangat berbahagia berhadapan dengan masyarakat Kaltim yang ramah dan baik hati. Kepimpinan Isran-Hadi sudah menggambarkan dengan sangat tepat sekali bagaimana rakyat Kaltim, dikenal selalu bersemangat dalam mencapai tujuan yang baik," ungkap Akmal Malik usai serah terima jabatan Pj Gubernur Kaltim di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Rabu (4/10/2023).

Akmal juga menyebutkan, bahwa rakyat Kaltim memiliki falsafah hidup dari Bahasa Banjar yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita, sebagaimana pesan dari Pangeran Antasari "Waja Sampai Kapurung".

Dikemukakannya, apresiasi kepada DPRD Kaltim, Bupati, Wali kota, dan ASN yang telah mendukung kinerja pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Apabila kita melihat gambaran capaian kinerja makro ekonomi di Kaltim, ada beberapa hal yang patut kita banggakan bersama," ujarnya.

Kemudian, meski di tengah pandemi yang cukup keras melanda Indonesia bahkan dunia, Kaltim menunjukkan performa yang sangat positif, jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Ia juga menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim naik sebesar 4,4 persen, sementara nasional hanya 2,1 persen.

Menurut Akmal, di bawah kepemimpinan Isran-Hadi sangat fokus terhadap meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim sejak tahun 2018 pada lima tahun terakhir selalu ada peningkatan yang cukup signifikan, bahkan poin

IPM Kaltim lebih tinggi dari standar nasional.

Sedangkan, kemiskinan di Kaltim turun dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan tren yang positif. Kendati demikian, Akmal mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan masih perlu diapresiasi karena tingkat prestasinya masih di bawah angka nasional.

"Tingkat pengangguran terbuka data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa masalah penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas yang sama-sama diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kaltim," bebernya.

Adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan, ia melihat proses ketimpangan pendapatan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, menurutnya kesenjangan pembangunan di Kaltim semakin kecil tiap tahunnya.

Akmal Malik juga mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim dalam mengendalikan inflasi, yang menjadi perhatian presiden. Inflasi di Kaltim memiliki kecenderungan tidak jauh berbeda dengan trend inflasi nasional dan berada pada level yang terkendali rendah.

"Kami percaya terkendalinya inflasi tak terlepas dari peran yang dilakukan Isran-Hadi yang setiap hari terus memantau perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, berada di jajaran pemerintah provinsi yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem informasi LPPD. Kaltim memiliki kinerja yang luar biasa dalam pelayanan dasar, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

"Semoga setelah Sertijab, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kaltim dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



NAMA PJ GUBERNUR KALTIM DICATUT, OKNUM PENIPU MINTA UANG KE OPD DAN BUMD

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang baru-baru ini dilantik, tidak pernah meminta sejumlah uang kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkup Pemprov Kaltim.

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah, merespons terhadap laporan-laporan yang diterimanya tentang oknum-oknum yang mengaku sebagai Pj Gubernur Kaltim dan meminta uang dengan mencatut foto profil dan nomor telepon seluler yang berbeda-beda.

"Jadi tidak benar jika ada pesan WhatsApp yang beredar yang mengatasnamakan Pj Gubernur Kaltim, Pak Akmal Malik, kemudian meminta-minta uang ke OPD. Jika ada yang

menerima pesan-pesan seperti itu dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, segera laporkan," tegas Syarifah Alawiyah.

Munadhir Mubarak, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Media Pj Gubernur Kaltim, juga menegaskan pentingnya berhati-hati terhadap modus penipuan semacam ini.

Dia mengingatkan semua perangkat daerah dan mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak menanggapi pesan-pesan yang mengatasnamakan Pj Gubernur Kaltim.

"Bagi pimpinan perangkat daerah maupun instansi jika menerima pesan yang mengatasnamakan Pj Gubernur Kaltim untuk tidak menanggapi. Karena ini penipuan," pesannya.

Sumber: adpimprovkaltim
Editor: Agus Susanto

MANTAP! BEGINI KERENNYA NEW CBR150R EDISI MOTOGP

SAMARINDA – PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapi jajaran New CBR150R dengan tampilan edisi spesial MotoGP untuk menyambut kehadiran gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 13-15 Oktober 2023 mendatang. Performa tinggi dengan karakter yang lincah selaras dengan tampilan New CBR150R edisi MotoGP yang membanggakan bagi pecinta balap di Indonesia.

Serupa dengan livery dari sepeda motor yang digunakan oleh Marc Marquez dan Joan Mir dari Repsol Honda Team di MotoGP, New CBR150R edisi kejuaraan balap tertinggi di dunia ini hadir pada varian ABS. Memiliki tampilan yang disukai pecinta kecepatan, motor sport Honda berkonsep Total Control ini pun menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan. Hal ini pun ditunjang oleh fitur-fitur canggih seperti inverted front suspension, full digital panelmeter yang informatif, LED sistem pada seluruh fitur pencahayaan, dan fitur keamanan berkendara seperti Anti-lock Braking System (ABS) dan emergency stop signal (ESS).

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan kehadiran New CBR150R MotoGP edition merupakan jawaban untuk pecinta sepeda motor sport Honda yang juga menyukai kompetisi balap MotoGP dengan desain yang agresif, canggih, dan performa tinggi.

"Momentum MotoGP di Tanah Air merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Melalui momen ini kami hadirkan New CBR150R MotoGP edition untuk pecinta sepeda motor sport Honda yang juga memiliki kecintaan terhadap kompetisi balap tertinggi dunia, MotoGP," ujar Octa.

New CBR150R merupakan sepeda motor sport fairing den-



gan bobot teringan di kelasnya. Melalui gaya berkendara yang "racy" ditunjang dengan penyesamaan Inverted Front Suspension Separated Function Fork - Big Piston (SFF-Big Piston). Komponen ini pun sanggup memberikan rasa nyaman, serta membuat sepeda motor yang lebih stabil saat berkendara harian, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Penyesamaan suspensi tersebut membuat handling semakin lincah, menegaskan model ini sebagai sepeda motor sport full fairing dengan kendali terbaik yang menyatu pada kebutuhan kaum urban.

Fitur Assist/ Slipper Clutch kini menjadi bagian dari New CBR150R yang sanggup meningkatkan sensasi berkendara menyenangkan. Slipper Clutch berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat melakukan penurunan gigi secara ekstrem. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan.

Performa tingginya ditopang oleh mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan, mampu

mengeluarkan tenaga maksimal hingga 12,6 kW (17,1 PS) @9.000 rpm, dan torsi puncak 14,4 Nm @7.000 rpm. Dipadukan dengan transmisi 6-percepatan, jantung pacu ini sanggup membawa New CBR150R melaju dari 0-200 meter hanya dengan 10,6 detik, dan kecepatan maksimal mencapai 127 km/jam.

New CBR150R juga ditunjang dengan banyak fitur unggulan lain, termasuk adanya Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS). Fitur ini sudah diterapkan pada beberapa model big bike yang berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri secara bersamaan saat melakukan rem mendadak.

Penampilan New CBR150R yang sporty semakin tegas dengan mempertahankan wavy disc brake. Semua informasi yang dikehendaki pengendara ditampilkan melalui panel meter ramping full digital yang mudah dilihat.

New CBR150R MotoGP edition hadir dengan pilihan warna yang semakin menarik seperti Dominator Matte Black, Victory Red Black serta Honda Tricolor dan dibandrol seharga 44.590.000 On The Road Samarinda. (rls)

 **Grand Kartika**
HOTEL

OK!

TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~**30% OFF**

Rp488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs **BOOK NOW****0811 581 3669**
www.hotelgrandkartika.com